

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program andalan nasional melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (*demand responsive approach*). Pendekatan Tanggap Kebutuhan (*Demand Responsive Approach*) adalah pendekatan yang menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai faktor yang menentukan dalam pengambilan keputusan termasuk di dalamnya pendanaan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah (i) tersedianya pilihan yang terinformasikan; (ii) pemerintah berperan sebagai fasilitator; (iii) terbukanya akses seluas-luasnya bagi partisipasi dari seluruh pihak yang berkepentingan; (iv) aliran informasi yang memadai bagi masyarakat.

Untuk mencapai akses 100% air minum, diperlukan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai tahapan. Hal ini mencakup proses analisis permasalahan, pengambilan keputusan terkait jenis sarana yang akan digunakan, serta sistem operasional dan perawatan yang diperlukan. Selain itu, penting juga untuk menjalin kemitraan dengan pihak lain, seperti pemerintah dan sektor swasta, yang dapat mendukung upaya ini, maka terbentuklah Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS) yang bertugas untuk memfasilitasi dan mengelola program PAMSIMAS. KP-SPAMS ini merupakan lembaga yang dibentuk bersama oleh masyarakat, sehingga masyarakat memiliki peran aktif dalam menjaga dan mendorong keberlanjutan program tersebut.

Program PAMSIMAS I bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota (peri-urban) yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang layak serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dilaksanakan pada tahun 2008-2013 yang berlokasi di 15 Propinsi, 110 Kabupaten/Kota dan 5200 Desa. Dilanjutkan dengan PAMSIMAS II yang

bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaaan dan peri-urban yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, serta meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat, dilaksanakan pada tahun 2013 – 2016 di 32 Propinsi, 233 Kabupaten/Kota dan 6800 Desa. Kemudian dilanjutkan dengan PAMSIMAS III pada tahun 2016-2022 yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani di wilayah perdesaaan dan peri-urban yang dapat mengakses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, di 33 Propinsi, 396 Kabupaten 11 Kota dan 27.000. (*Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Petunjuk Teknis Penguatan Keberlanjutan Program PAMSIMAS, 2020*).

Pendanaan program PAMSIMAS bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa melalui APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten, APBDes, serta dana kontribusi masyarakat, yang didukung oleh pinjaman luar negeri (PHLN) dari Bank Dunia dan hibah dari DFAT (Pemerintah Australia).

Di Kabupaten Bireuen Program PAMSIMAS dimulai pada tahun 2014 yang di kenal dengan istilah PAMSIMAS II (2013 - 2015) yang mana selama 2 tahun telah melayani 21 gampong, 11 gampong di tahun 2014 dan 10 gampong di tahun 2015. Pada tahun 2017 – 2023 memasuki fase PAMSIMAS III melayani 75 gampong yang di fokuskan pada gampong yang tersedia sharing dana 10% dari APBDes. Total wilayah dampingan PAMSIMAS sampai pada Tahun 2023 sebanyak 96 gampong dari total 609 gampong di Kabupaten Bireuen.

Permasalahan dalam penelitian ini, berdasarkan kondisi lapangan secara keseluruhan Kondisi keberfungsian sarana yang telah dibangun oleh Program PAMSIMAS Tahun Anggaran 2014 - 2023 di Kabupaten Bireuen terdapat 12 desa tidak berfungsi. Mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen mempunyai keterbatasan anggaran, maka gampong yang perlu ditangani perlu dicarikan skala prioritasnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Penentuan Prioritas Pengelolaan Keberlanjutan Program PAMSIMAS Kabupaten Bireuen”

Proses menentukan prioritas pengelolaan dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap berbagai faktor untuk membuat keputusan. Keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen dievaluasi berdasarkan 5 kriteria, yaitu aspek teknis, keuangan, kelembagaan, sosial, dan lingkungan. Setiap kriteria memiliki karakteristik unik di setiap gampong di Kabupaten Bireuen. Dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tersebut, urutan prioritas penanganan keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen dapat ditentukan menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP adalah metode analisis yang memungkinkan pengambilan keputusan yang cermat dengan mempertimbangkan semua kriteria secara komprehensif dalam menetapkan prioritas berbagai alternatif dari perspektif multidisipliner atau pemangku kepentingan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Kriteria manakah yang dominan mempengaruhi keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen.
2. Bagaimanakah urutan gampong prioritas dalam pengelolaan keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen dengan menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kriteria yang dominan mempengaruhi keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui urutan gampong prioritas dalam pengelolaan keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen dengan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dapat menjadi rujukan bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam menentukan urutan prioritas pengelolaan keberlanjutan program PAMSIMAS sesuai dengan ketersediaan anggaran.
2. Manfaat akademis dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan prioritas pengelolaan keberlanjutan program PAMSIMAS dengan menggunakan metode AHP.

#### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini difokuskan pada penentuan kriteria prioritas pengelolaan yang mempengaruhi keberlanjutan program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen, seperti aspek teknis, aspek keuangan, aspek kelembagaan, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
2. Studi ini akan mempertimbangkan desa-desa sasaran program PAMSIMAS yang di bangun pada TA. 2014 sampai dengan TA 2023 dengan kondisi tidak berfungsi.
3. Batasan geografis penelitian ini terbatas pada 12 gampong yang menjadi sasaran program PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen dengan kondisi tidak berfungsi, yaitu Gampong Ulee Alue Kecamatan Samalanga, Gampong Paku Kecamatan Simpang Mamplam, Gampong Meunasah Teungoh dan Meunasah Reudep Kecamatan Pandrah, Gampong Jeumpa Sikureng dan Alue Seutui Kecamatan Jeunieb, Gampong Paloh Kecamatan Peusangan, Gampong Blang Mane dan Ulee Jalan Kecamatan Peusangan Selatan, Gampong Mon Ara Kecamatan Makmur, Gampong Paya Kareung dan gampong Cot Rambat Kecamatan Gandapura.
4. Batasan sumber daya termasuk keterbatasan anggaran untuk penelitian, serta keterbatasan akses ke data tertentu yang mungkin mempengaruhi kedalaman analisis.

## 1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif melalui penyebaran kuesioner.
2. Teknik *sampling* menggunakan *purposive sampling*.
3. Kriteria responden:
  - Untuk penentuan prioritas gampong adalah pihak pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan (*stakeholders*) yang terkait dengan pelaksanaan program PAMSIMAS yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana dan Koordinator Kabupaten Program PAMSIMAS Kabupaten Bireuen.
  - Untuk penentuan Kriteria dominan selain 5 responden diatas peneliti juga melibat kan Unsur Kelompok Pengelola Sarana PAMSIMAS di Kabupaten Bireuen (12 gampong) sebagai responden.
4. Teknik analisis data digunakan AHP.